



# PERATURAN DESA MERGOSARI NO. 7 TAHUN 2025

## TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026



Desa  
Mergosari



Kecamatan  
Tarik



Kabupaten  
Sidoarjo





**KEPALA DESA MERGOSARI  
KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA MERGOSARI  
NOMOR 07 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MERGOSARI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);

25. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
30. Peraturan Desa Mergosari Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Mergosari (Berita Desa Mergosari Tahun 2025 Nomor 03);
31. Peraturan Desa Mergosari Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mergosari Tahun 2025 (Berita Desa Mergosari Tahun 2025 Nomor 04).

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, nomor : 400.10.2.4/15634/438.5.8/2025, tanggal 02 Desember 2025, perihal : Pedoman Penyusunan Perdes APBDes Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MERGOSARI

dan

KEPALA DESA MERGOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MERGOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mergosari Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp	1.683.412.815,00
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	883.206.537,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	325.102.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	106.100.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	192.673.878,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	47.600.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.554.682.415,00
	Surplus/(Defisit)	Rp	128.730.400,00
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan	Rp	128.730.400,00
	b. Pengeluaran	Rp	128.730.400,00
	Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	128.730.400,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mergosari.

Ditetapkan di : Mergosari

Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Mergosari

Pada tanggal : 31 Desember 2025



LEMBARAN DESA MERGOSARI NOMOR 07 TAHUN 2025

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA MERGOSARI  
 NOMOR 07 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MERGOSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	53.850.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.629.562.815,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.683.412.815,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	606.160.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	746.082.415,00	
5.3.	Belanja Modal	154.840.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	47.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.554.682.415,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>128.730.400,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	128.730.400,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	128.730.400,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(128.730.400,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KECAMATAN MERGOSARI, 31 Desember 2025  
 KEPALA DESA  
 MERGOSARI  
 EKO BUDI SANTOSO



LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA MERGOSARI  
 NOMOR 07 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MERGOSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	53.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.629.562.815,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.683.412.815,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>883.206.537,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>713.372.537,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	341.280.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	341.280.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	134.103.537,00	PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.103.537,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.309.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.309.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	23.380.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	23.380.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	117.300.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	117.300.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>27.800.000,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	26.000.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;STN K;BPKB;dll)	1.800.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>39.300.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	12.400.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.320.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.320.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15.960.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.960.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.620.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>102.734.000,00</b>	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	102.734.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.734.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>325.102.000,00</u></b>	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>122.000.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insektif)	78.310.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.310.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	10.750.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.840.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	3.840.000,00	
2.2.91		Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men	3.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>22.502.000,00</b>	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	12.000.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	10.502.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.502.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>125.000.000,00</b>	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	125.000.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>38.400.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	38.400.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>17.200.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	13.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>106.100.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>18.200.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	16.200.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	2.000.000,00	PBH
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>67.900.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	58.900.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.900.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>192.673.878,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>58.000.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	13.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	45.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>69.763.278,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.200.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.363.278,00	ADD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.363.278,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	52.200.000,00	ADD
4.3.03	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>3.500.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>61.410.600,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	61.410.600,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.410.600,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>47.600.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>4.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>4.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>39.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.554.682.415,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>128.730.400,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	128.730.400,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(128.730.400,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

MERGOSARI, 31 Desember 2025

KEPALA DESA  
  
 EKO BUDI SANTOSO



**KEPALA DESA MERGOSARI  
KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN KEPALA DESA MERGOSARI  
NOMOR 04 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MERGOSARI,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2.
- 3.

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka

Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 530);

18. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);

- 190
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
  25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
  26. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
  27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
  28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
  29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);  
Peraturan Desa Mergosari Nomor 03 Tahun 2025 Tentang

30. Perubahan Kedua Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Mergosari (Berita Desa Mergosari Tahun 2025 Nomor 03);  
Peraturan Desa Mergosari Nomor 04 Tahun 2025 Tentang
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa Mergosari Tahun 2025 (Berita Desa Mergosari Tahun 2025 Nomor 04).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MERGOSARI TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	Rp	53.850.000,00
1.2.	Transfer	Rp	1.629.562.815,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.683.412.815,00
2	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	883.206.537,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	325.102.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	106.100.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	192.673.878,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	47.600.000,00

	Jumlah Belanja	Rp	1.554.682.415,00
	Surplus/(Defisit)	Rp	128.730.400,00
3	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	128.730.400,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	128.730.400,00
	Selisih pembiayaan (3.1. – 3.2.)	Rp	128.730.400,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mergosari.

Ditetapkan di : Mergosari

Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Mergosari

Pada tanggal : 31 Desember 2025



BERITA DESA MERGOSARI TAHUN 2025 NOMOR 04

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MERGOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			53.850.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			53.850.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			53.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.629.562.815,00	
	4.2.1.	Dana Desa			643.652.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			643.652.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			513.667.537,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			513.667.537,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			472.243.278,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			472.243.278,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			1.683.412.815,00	
	5.	<b>BELANJA</b>				
01		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			883.206.537,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			713.372.537,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	orang	72.000.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			72.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			72.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			12.000.000,00	
<b>1.01.02.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>8</b>	<b>orang</b>	<b>341.280.000,00</b>	<b>ADD</b>
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			341.280.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			341.280.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			284.400.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			56.880.000,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	<b>1</b>	<b>paket</b>	<b>134.103.537,00</b>	<b>PAD, PBH</b>
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			134.103.537,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.703.537,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			12.566.537,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.137.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			56.400.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			25.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			25.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			60.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			10.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			50.000.000,00	
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	<b>1</b>	<b>paket</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>PBH</b>
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			800.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.01.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			0,00	
1.01.06.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
<b>1.01.08.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	1	paket	<b>19.309.000,00</b>	<b>DDS</b>
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.309.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.619.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.749.000,00	
1.01.08.	5.2.1.90	Belanja Pendukung Kegiatan Adat/Kebudayaan/Keagamaan (Ruwat Desa / N			13.870.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.690.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.690.000,00	
<b>1.01.90.</b>		<b>Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa</b>	1	paket	<b>23.380.000,00</b>	<b>PAD, PBH</b>
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			23.380.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			23.380.000,00	
1.01.90.	5.1.1.90	Tunjangan Keluarga			6.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			9.600.000,00	
1.01.90.	5.1.1.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa			2.500.000,00	
1.01.90.	5.1.1.94	Uang Makan			5.280.000,00	
<b>1.01.91.</b>		<b>Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa</b>	1	paket	<b>117.300.000,00</b>	<b>PAD, PBH</b>
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			117.300.000,00	
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			117.300.000,00	
1.01.91.	5.1.2.90	Tunjangan Keluarga			24.960.000,00	
1.01.91.	5.1.2.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			38.250.000,00	
1.01.91.	5.1.2.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			11.850.000,00	
1.01.91.	5.1.2.94	Uang Makan			42.240.000,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>27.800.000,00</b>	
<b>1.02.03.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</b>	1	paket	<b>26.000.000,00</b>	<b>PBH</b>

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			26.000.000,00	
1.02.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.000.000,00	
1.02.03.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			4.000.000,00	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			15.000.000,00	
1.02.03.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
1.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4.275.000,00	
1.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			9.975.000,00	
1.02.03.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			7.000.000,00	
1.02.03.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			7.000.000,00	
1.02.91.		<b>Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;STNK;BPKB;dll)</b>	1	paket	1.800.000,00	PBH
1.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.800.000,00	
1.02.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.800.000,00	
1.02.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.800.000,00	
01.04.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			39.300.000,00	
1.04.02.		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)</b>	1	paket	12.400.000,00	PBH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.400.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.400.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.100.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
1.04.03.		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	1	paket	5.320.000,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.320.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.020.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.350.000,00	
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			270.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	
1.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
1.04.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			1.500.000,00	
1.04.04.		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	1	paket	<b>15.960.000,00</b>	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.960.000,00</b>	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.060.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan			1.200.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.050.000,00	
1.04.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			810.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
1.04.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.400.000,00	
1.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.500.000,00	
1.04.04.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			4.500.000,00	
1.04.07.		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</b>	1	paket	<b>5.620.000,00</b>	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.620.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.120.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan			500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.350.000,00	
1.04.07.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			270.000,00	
1.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
1.04.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
1.04.07.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
1.04.07.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			1.500.000,00	
01.05.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>			<b>102.734.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.91.		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	paket	102.734.000,00	PBH
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			102.734.000,00	
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			43.734.000,00	
1.05.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.234.000,00	
1.05.91.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			2.000.000,00	
1.05.91.	5.2.1.90	Belanja Pendukung Kegiatan Adat/Kebudayaan/Keagamaan (Ruwat Desa / N			30.000.000,00	
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
1.05.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			15.000.000,00	
1.05.91.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			15.000.000,00	
1.05.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			11.000.000,00	
1.05.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			11.000.000,00	
1.05.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00	
1.05.91.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			30.000.000,00	
02		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>325.102.000,00</b>	
02.02.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>122.000.000,00</b>	
2.02.02.		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)</b>	1	Paket	<b>78.310.000,00</b>	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			78.310.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			37.210.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			37.210.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			900.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			31.800.000,00	
2.02.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			31.800.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
2.02.02.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			8.400.000,00	
2.02.04.		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	1	PAKET	<b>26.100.000,00</b>	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.100.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.600.000,00	
2.02.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			9.600.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00	
2.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.500.000,00	
2.02.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			4.500.000,00	
2.02.06.		<b>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</b>	1	Paket	<b>10.750.000,00</b>	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.750.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.250.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.100.000,00	
2.02.06.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			150.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00	
2.02.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
2.02.08.		<b>Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD</b>	1	paket	<b>3.840.000,00</b>	DDS
2.02.08.	5.3.	Belanja Modal			3.840.000,00	
2.02.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.840.000,00	
2.02.08.	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			3.840.000,00	
2.02.91.		<b>Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men</b>	1	paket	<b>3.000.000,00</b>	DDS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.850.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00	
2.02.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
2.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.150.000,00	
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>22.502.000,00</b>	
<b>2.03.07.</b>		<b>Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa</b>	1	paket	<b>12.000.000,00</b>	DDS
2.03.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
2.03.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
2.03.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00	
<b>2.03.17.</b>		<b>Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)</b>	1	paket	<b>10.502.000,00</b>	DDS
2.03.17.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.502.000,00	
2.03.17.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.500.000,00	
2.03.17.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
2.03.17.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.002.000,00	
2.03.17.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.002.000,00	
2.03.17.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.000.000,00	
2.03.17.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			5.000.000,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>125.000.000,00</b>	
<b>2.04.17.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)</b>	1	paket	<b>125.000.000,00</b>	DDS
2.04.17.	5.3.	Belanja Modal			125.000.000,00	
2.04.17.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			125.000.000,00	
2.04.17.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.04.17.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			36.600.000,00	
2.04.17.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			87.500.000,00	
<b>02.05.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			<b>38.400.000,00</b>	
<b>2.05.02.</b>		<b>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</b>	1	paket	<b>38.400.000,00</b>	DDS
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.400.000,00	
2.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			26.400.000,00	
2.05.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			26.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2		3	VOLUME			SATUAN	4
2.05.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			12.000.000,00			
2.05.02.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			12.000.000,00			
<b>02.06.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>17.200.000,00</b>			
2.06.02.		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	1	paket	<b>13.800.000,00</b>	DDS		
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.800.000,00			
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00			
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.000.000,00			
2.06.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.800.000,00			
2.06.02.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			4.200.000,00			
2.06.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			6.600.000,00			
2.06.03.		<b>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa</b>	1	Paket	<b>3.400.000,00</b>	DDS		
2.06.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.400.000,00			
2.06.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.250.000,00			
2.06.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.100.000,00			
2.06.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			150.000,00			
2.06.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.050.000,00			
2.06.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.050.000,00			
2.06.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			100.000,00			
2.06.03.	5.2.5.92	Belanja Jasa Domain Desa			100.000,00			
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>106.100.000,00</b>			
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>18.200.000,00</b>			
3.01.02.		<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</b>	1	paket	<b>16.200.000,00</b>	PBH		
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.200.000,00			
3.01.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			16.200.000,00			
3.01.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			16.200.000,00			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.06.		<b>Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin</b>	1	paket	2.000.000,00	PBH
3.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
3.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
3.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
3.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
03.02.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			15.000.000,00	
3.02.03.		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	1	Paket	15.000.000,00	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Pendukung Kegiatan Adat/Kebudayaan/Keagamaan (Ruwat Desa / N			15.000.000,00	
03.03.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			5.000.000,00	
3.03.02.		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</b>	1	paket	5.000.000,00	PBH
3.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.900.000,00	
3.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00	
3.03.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			150.000,00	
3.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
3.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
3.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.500.000,00	
3.03.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			2.500.000,00	
03.04.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			67.900.000,00	
3.04.02.		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	1	PAKET	9.000.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.000.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			9.000.000,00	
3.04.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
3.04.04.		<b>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	1	paket	58.900.000,00	PBH
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			58.900.000,00	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			58.900.000,00	
3.04.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			58.900.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>192.673.878,00</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>58.000.000,00</b>	
<b>4.02.01.</b>		<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)</b>	1	paket	<b>13.000.000,00</b>	<b>DDS</b>
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.000.000,00	
4.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
4.02.01.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			5.000.000,00	
4.02.01.	5.2.1.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan			5.000.000,00	
4.02.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.000.000,00	
4.02.01.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			3.000.000,00	
<b>4.02.04.</b>		<b>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</b>	1	Ls	<b>45.000.000,00</b>	<b>DDS</b>
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			45.000.000,00	
4.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			45.000.000,00	
4.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			45.000.000,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>69.763.278,00</b>	
<b>4.03.01.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</b>	1	paket	<b>1.200.000,00</b>	<b>PBH</b>
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.200.000,00	
4.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
4.03.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.200.000,00	
<b>4.03.02.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	1	paket	<b>16.363.278,00</b>	<b>ADD, PBH</b>
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.363.278,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.363.278,00	
4.03.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			16.363.278,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
4.03.03.		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>	5	ORANG	52.200.000,00	ADD
4.03.03.	5.1.	Belanja Pegawai			52.200.000,00	
4.03.03.	5.1.4.	Tunjangan BPD			52.200.000,00	
4.03.03.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			52.200.000,00	
04.04.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			3.500.000,00	
4.04.01.		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>	1	paket	3.500.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.500.000,00	
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
04.05.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			61.410.600,00	
4.05.02.		<b>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</b>	1	paket	61.410.600,00	DDS
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			61.410.600,00	
4.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			61.410.600,00	
4.05.02.	5.2.1.90	Belanja Pendukung Kegiatan Adat/Kebudayaan/Keagamaan (Ruwat Desa / N			15.816.000,00	
4.05.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			45.594.600,00	
05		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			47.600.000,00	
05.01.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			4.000.000,00	
5.01.00.		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	1	paket	4.000.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00	
05.02.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			4.000.000,00	
5.02.00.		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	1	paket	4.000.000,00	DDS
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00	DDS
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			39.600.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	11	kpm	39.600.000,00	
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			39.600.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			39.600.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			39.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.554.682.415,00</b>	
		<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>128.730.400,00</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			128.730.400,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			128.730.400,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			128.730.400,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>128.730.400,00</b>	
		<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

